

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi ternyata memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat (publik). Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Kondisi ini akan semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas financial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan.

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang di publikasikan oleh keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*). Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan 4) dapat dipahami.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, yaitu menggunakan basis kas menuju akrual. Basis akrual mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas. Kondisi ini secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, agar akuntabilitas, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*) dapat tercapai.

Pada Lampiran II SAP (paragraph 33-37) telah dijelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa depan ; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat di verifikasi; Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dan dapat dipahami oleh penggunanya.

Perkembangan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia adalah hal yang menarik untuk di telaah lebih lanjut. Pada kenyataannya, masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Dalam pasal 33, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, disebutkan bahwa Menteri keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah Daerah belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria andal (*reliable*) dan relevan, sedangkan dua unsur nilai informasi ini sangat penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Disamping itu akan terjadi kesulitan apabila akan diperbandingkan antar periode.

Dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Sistem akuntansi sebagai salah satu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankannya agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, tersedianya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Pada organisasi pemerintahan, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan mutu dan kualitas pekerjaannya. Oleh karena itu, dukungan pengguna teknologi informasi yang sesuai dengan pekerjaannya akan semakin mendukung ketepatanwaktuan penyajian hasil pekerjaannya, termasuk informasi keuangan. Ketepatanwaktuan merupakan kualitas

yang berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Dampak berikutnya adalah penggunaan informasi yang benar-benar dapat diandalkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh organisasi pemerintahan itu sendiri.

Menurut Mardiasmo: **“Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut”**.¹

Perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara otomatis juga membutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dari pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman akuntansi ini berkaitan dengan proses dan prosedur akuntansi yang dilakukan berdasarkan SAP.

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai

¹Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat: Andi, Yogyakarta, 2009,hal.146

dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara.

Pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum di temukan kualitas pelaporan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak. Karena pada kenyataannya laporan keuangan yang di periksa BPK sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2013 BPK memberikan opini Tidak Memberikan Komentar atas laporan keuangan pada kabupaten Deli Serdang dan pada tahun 2014 pemerintah kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan pendapat dari BPK yaitu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Namun hal tersebut masih tetap kurang karena laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Deli Serdang belum maksimal dan masih ada hal-hal yang harus diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang baik.

Peneliti terdahulu seperti Ronauli Sibuea tahun 2015, melakukan penelitian tentang Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah, dengan hasil secara simultan bahwa Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Berpengaruh positif Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penelitian ini hanya berfokus pada kualitas laporan yang andal dan tepat waktu sedangkan peneliti saat ini berfokus sepenuhnya pada kualitas pelaporan keuangan.

Samuel Hutapea tahun 2015, melakukan penelitian tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan empat variabel pengaruh terhadap pelaporan keuangan.

Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kualitas Pelaporan Keuangan Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini dilakukan untuk mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus secara sistematis, berdasarkan latarbelakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang , dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
3. Bagi Akademis, dapat jadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.²

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang lengkap dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Erlina, Sirojuzilam, dan Rasdianto, Laporan Keuangan daerah **"suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan**

²Erlina, dkk, **Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah**, USU Press, Medan, 2012 shal. 73.

daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya”³

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

³Ibid, hal.72

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Henley dkk. dalam Harun menyatakan lima tujuan maupun fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1. Sebagai Petunjuk Adanya Kepatuhan Pelaksanaan Tugas**
- 2. Laporan Akuntabilitas dan Alat Evaluasi**
- 3. Alat Perencanaan**
- 4. Petunjuk Adanya Kelanjutan Organisasi**
- 5. Alat Publikasi**

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran ; dan
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - 1) Aset
 - 2) Kewajiban
 - 3) Ekuitas Dana
 - 4) Pendapatan

- 5) Belanja
- 6) Transfer
- 7) Pembiayaan dan
- 8) Arus Kas

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komperhensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Dari pengertian-pengertian di atas laporan keuangan adalah laporan tentang keuangan daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan suatu daerah untuk dapat dipergunakan para pengguna laporan tersebut dalam tujuan yang berbeda-beda setiap pengguna laporan.

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah **”ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”**.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) Relevan**
- b) Andal**
- c) Dapat dibandingkan; dan**

d) Dapat dipahami.⁴

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, informasi yang relevan adalah :

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama

⁴Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**, Fokus Media, Bandung, 2010, hal. 25

yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas

menerapkan kebijakan yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari peraturan pemerintah di atas tentang standar akuntansi pemerintahan, maka agar suatu laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas adalah jika laporan keuangan tersebut adalah sesuai dengan keinginan pengguna laporan artinya laporan keuangan tersebut mempunyai manfaat bagi pengguna, penyajiannya tidak melewati periode yang ditentukan dan tidak ada yang dikurangi atau dlebih-lebihkan sehingga nantinya laporan tersebut layak dilihat pengguna, dan pengguna dapat memahami sehingga nantinya bisa dibandingkan setiap periode dan terhadap laporan keuangan daerah lain.

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada sektor swasta manajemen adalah mekanisme pengawasan perusahaan. Faktor potensial yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan adalah kualitas dari mekanisme tata kelola eksternal perusahaan (seperti: kualitas audit), dan mekanisme tata kelola internal perusahaan (seperti: kualitas dewan direksi).

Selain itu keputusan manajemen dan regulasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, mekanisme tata kelola internal dan eksternal perusahaan juga akan mempengaruhi pelaporan keuangan. Penilaian kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah yang ada. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada dasarnya standar akuntansi pemerintahan itu adalah suatu prosedur akuntansi yang telah disusun agar dapat dilakukan pemerintahan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan tujuan agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan dan pemantauan terhadap kepatuhan penggunaan dana.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2.2 Sumber Daya Manusia

Menurut Faustino Cardoso Gomes Sumber Daya Manusia merupakan “**Salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas**”.⁵

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Sumber daya manusia mencakup : pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja.

1. Pendidikan Formal

Secara formal pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

⁵Faustino Cardoso Gomes, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal.1

Menurut Malaya dalam Skripsi Samuel Hutapea yg berjudul Kualitas laporan keuangan ditinjau dari SDM dan Pengendalian Intern pada pemerintah Kabupaten Toba Samosir **“pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan”**.⁶ Sedangkan itu menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno mengatakan “pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan organisasi yang bersangkutan”.

Menurut Sonny Sumarsono :

“pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu factor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja, demikian akan meningkatkan produktivitas kerja”.⁷

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal organisasi merupakan suatu prosese mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan.

Suatu pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan formal berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan ketrampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman. Perkembangan ini mengaju kepada membuat manusia menjadi lebih sempurna,

⁶Samuel Hutapea, **Kualitas Laporan Keuangan Ditinjau dari SDM dan Pengendalian Intern**, Medan, 2012. Hal.17

⁷Sonny Sumarsono, **Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan**, Graha Ilmu, Jember, 2003. Hal 49

membuat manusia meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral.

Dengan pendidikan formal yang memadai staf bagian keuangan/akuntansi akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami pekerjaan yang harus dilakukan. Maka dapat disimpulkan semakin tinggi pendidikan formal staf bagian akuntansi/keuangan dan latar belakang akuntansi akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik saat ini.

Pendidikan dan Pelatihan pada Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Adapun tujuan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)

Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Diklat Kepemimpinan terdiri atas empat jenjang:

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV.
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III.
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II.
4. Diklat Kepemimpinan Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I.

b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau ketrampilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Diklat Fungsional adalah jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

1. Diklat fungsional keahlian yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
2. Diklat fungsional ketrampilan yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi Teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing.

1. Diklat teknis bidang umum/administrasi dan manajemen yaitu diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan di bidang pelayanan teknis yang bersifat umum dan di bidang administrasi dan manajemen dalam menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan.
2. Diklat teknis substantif yaitu diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
3. Pengalaman Kerja

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan dasar yang relatif tepat dan perilaku yang diakibatkan pengalaman dan praktek.

Siagian mengemukakan pengalaman kerja langsung adalah apabila seseorang bekerja pada suatu organisasi, namun karena beberapa hal meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi lain. Sedangkan pengalaman tidak

langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti seseorang pada organisasi itu meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota dari organisasi di mana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi.

Pengalaman kerja menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengalaman kerja yang dimiliki staf bagian akuntansi/keuangan akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan karena dengan pengalaman kerja profesional tersebut maka staf bagian akuntansi/keuangan lebih mengerti dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan. Pengalaman kerja profesional dalam bidang akuntansi akan memberikan kemudahan dan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.2.3 Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah

“suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.⁷

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pengendalian Intern
<http://www.biomaterial.lipi.go.id/main/wp-content/uploads/2013/02/PP-No.-60-Tahun-2008-tentang-Sistem-Pengendalian-Intern-Pemerintah.pdf>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mendefinisikan pengendalian intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”⁸

Menurut Kerangka Kerja Terpadu-Pengendalian Internal COSO, pengendalian internal dirancang dan dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas dalam kategori berikut (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal atas pengamanan aset terhadap akuisis tidak sah, penggunaan, atau disposisi juga penting, dan mungkin termasuk pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan tujuan operasi.”⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang secara terus-menerus harus dilakukan suatu organisasi dalam hal ini organisasi pemerintahan untuk mencapai keefektivitasan dan keefisienan operasi, dan keandalan laporan keuangan sehingga akan tercipta keamanan aset pemerintah.

Menurut Mulyadi untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu:

- 1. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**

⁸**Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern**
<http://www.biomaterial.lipi.go.id/main/wp-content/uploads/2013/02/PP-No.-60-Tahun-2008-tentang-Sistem-Pengendalian-Intern-Pemerintah.pdf>

⁹William F. Messier, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt, **Jasa Audit dan Assurance**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 192

2. **Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memerikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang , pendapatan ,dan biaya.**
3. **Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.**
4. **Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.¹⁰**

Struktur organisasi yang memisahkan merupakan kerangka(*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi. Di pihak lain , formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

¹⁰Mulyadi,**Sistem Akuntansi**, Salemba Empat, Jakarta,2009.hal 130

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara berikut ini dapat ditempuh :

1. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam organisasi dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang menduduki jabatan tersebut.
2. Pengembangan pendidikan karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Sistem Pengendalian Intern merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi :

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

2.1.2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh daerah.

Teknologi yang maju (komputerisasi) dirasa dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena teknologi diyakini mempermudah dan mempermudah.

Menurut Djoko Purwanto mengemukakan:

Teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa (*engineering*), dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya, computer dan interaksinya manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi social, ekonomi, dan budaya.¹¹

Teknologi informasi adalah pendukung aktivitas sumber daya manusia dalam mengerjakan tugasnya secara efisien dan efektif. Dalam organisasi, kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi sangat berkaitan. Apabila sumber daya manusia mempunyai kualitas yang baik, maka sumber daya manusia tersebut dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sehingga laporan keuangan daerah dapat disajikan dengan tepat waktu. Dalam penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu, teknologi informasi merupakan sarana yang paling penting untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dengan tepat waktu.

¹¹ Djoko Purwanto, **Komunikasi Bisnis**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 319

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu cara sumber daya manusia menggunakan teknologi informasi yang ada oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh para ahli individu yang mampu dalam mengoperasikan teknologi informasi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan, sehingga menghasilkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.2.5 Pemahaman Akuntansi

Perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara otomatis juga membutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dari pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Pemahaman akuntansi tersebut berkaitan dengan proses dan prosedur akuntansi yang dilakukan berdasarkan SAP.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang

selanjutnya disingkat SAP dan UU No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi pemerintah berbasis AkruaI.

Menurut Nunuy Nur Afiah **“Basis AkruaI (*accruaI Basis*) adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.”**¹²

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterapkan dalam tujuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan di lingkup pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangannya.

Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dalam melakukan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatifnya.

¹² Nunuy Nur Afiah, **Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Pertama: Kencana, Jakarta, 2009 hal.23

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ronauli Sibuea	2015	Pengaruh Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten Toba Samosir	Variabel independennya adalah kapasitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan pengendalian intern (X3), variabel dependennya adalah keterandalan (Y1) dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y2)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan
Samuel	2015	Pengaruh sumber daya	Variabel	Pengaruh sumber

Hutapea		manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pemerintah kabupaten Toba Samosir	independennya adalah sumber daya manusia (X1), dan sistem pengendalian intern (X2), Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas informasi laporan keuangan (Y)	daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
Dian Irma Diani	2014	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel Independennya adalah Pemahaman akuntansi (X1), pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah (X2), peran internal audit (X3), sedangkan	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

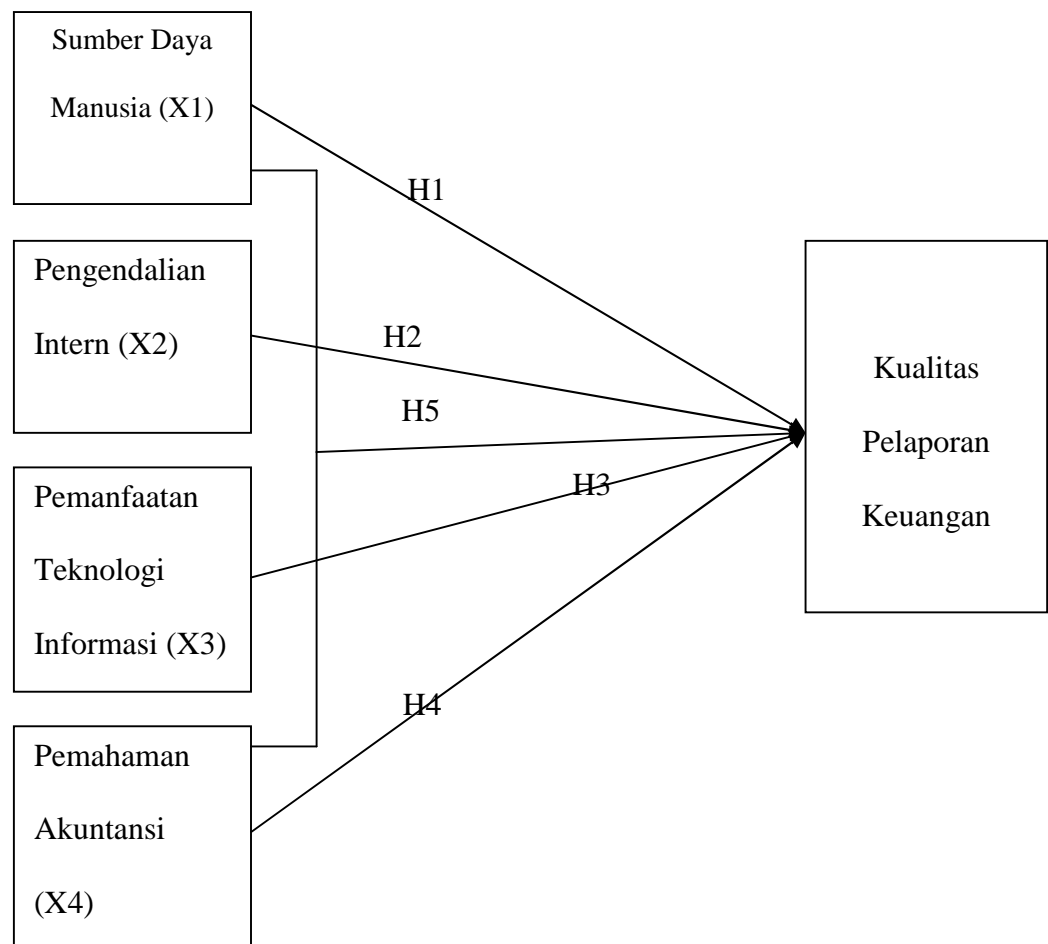
			variabel dependennya adalah Kualitas laporan keuangan (Y)	
--	--	--	---	--

2.2 Kerangka Berpikir

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bias jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan dan ketepatanwaktuan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penelitian mengembangkan kerangka penelitian ini yang diuji secara silmultan yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan (Y) diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh variabel independen (X) yaitu Sumber daya manusia (X1),

Pengendalian intern (X2), Pemanfaatan teknologi informasi (X3), dan Pemahaman akuntansi (X4).



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggaran maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatic dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan serta pengawasan.

Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk.

Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Selain itu, rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang diisyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Samuel Hutapea (2015) tentang pengaruh sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditunjukkan adanya hubungan antara sumber daya manusia dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diajukan hipotesis pertama:

H₁ : Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Hubungan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2005). Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administrasi (*internal administrative control*). Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur (pemangku kepentingan) yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan dalam laporan keuangan, menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik kualitatif keterandalan dan relevansi. Penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern dalam organisasi. Ketidak-tepatan penyajian laporan keuangan juga berkaitan dengan pengendalian intern yang diterapkan, sehingga akan sulit untuk dipahami dan tidak mampu untuk diperbandingkan.

Penelitian ini dilakukan oleh Samuel Hutapea dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Berdasarkan tinjauan dan hasil penelitian sebelumnya tentang pentingnya pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka diajukanlah hipotesis kedua:

H₂ :Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya:

- a. Pengolahan data, informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara murah dan mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi leuangan daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terseleggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolah data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data dan transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan, dan pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Ronauli Sibuea (2015) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Dalam penelitian tersebut di temukan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Dengan mempertimbangkan uraian tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka diajukan hipotesis ketiga:

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.4 Hubungan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dian Irma Diani menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dian Irma Diana telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pamanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dia menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dan menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka

semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis keempat:

H₄ : Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.5 Hubungan Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Ronauli Sibuea (2015) dengan judul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir” menyatakan bahwa secara simultan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah dengan tingkat signifikan yang diperoleh 0,001 dan lebih kecil dari 0,05.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Dian Irma Diana (2014) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” menyatakan bahwa secara simultan Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikan yang diperoleh 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Samuel Hutapea juga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir” menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikan yang diperoleh 0,030 lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis kedua, yaitu:

H5 : Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan di tinjau dari SDM, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi dilakukan dengan survey kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden atas pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner. Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang di jelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas sebagai konsekuensi variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variable terikat penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan (Y)

3.2.2 Variable Bebas (*Independent Variabel*)

Variable bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi dan mempunyai hubungan positif dan negative dengan variabel lainnya. Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia (X1), pengendalian intern (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3), pemahaman akuntansi (X4).

3.2.3 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah proses penentuan suatu ukuran variabel. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel terkait (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian, maka variabel tersebut didefinisikan sbagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaktif dan transformative yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut Guy *etal* adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ada 3 indikator pengukurannya yaitu:

- a) Pendidikan formal
- b) Pendidikan dan pelatihan
- c) Pengalaman kerja

2) Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian dari pengendalian dalam organisasi yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang ntuk menjaga keterandalan data akuntansi.

Sistem pengendalian intern dapat diukur dengan delapan indikator,

yaitu:

- a) Penggunaan formulir,
- b) Pemeriksaan mendadak,
- c) Pembagian tanggungjawab,
- d) Prosedur otorisasi dan dokumen transaksi,
- e) Perputaran jabatan,
- f) Pencocokan fisik kekayaan,
- g) Pemisahan fungsi atau wewenang,
- h) Pengawasan

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugas dimana pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi lunak yang digunakan.

4) Pemahaman Akuntansi (PA)

Pemahaman Akuntansi adalah pemahaman terhadap apa itu definisi akuntansi, bagaimana pengakuan dalam akuntansi, apa pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, dan bagaimana pengungkapan atau laporan di dalam akuntansi.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Suber Daya Manusia	Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada sumber daya manusia dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai	<p>-SDM memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas,</p> <p>-Peran dan tanggungjawab SDM ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.</p> <p>-SDM memiliki pendidikan</p> <p>-SDM memiliki pelatihan</p> <p>-SDM memiliki pengalaman</p> <p>-SDM memiliki sumber daya pendukung</p> <p>SDM memiliki pengintegrasian.</p>	Likert

<p>Pengendalian Intern</p>	<p>Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya efisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Penyusunan laporan keuangan -Prosedur dokumentasi -Transaksi dicatikan -Adanya otorisasi transaksi -Adanya fungsi internal auditor -Laporan keuangan direview -Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi telah didokumentasi. 	<p>Likert</p>
<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<p>Pemanfaatan teknologi suatu cara sumber daya manusia menggunakan teknologi informasi yang ada oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Tersedianya computer -Tersedianya jaringan internet -Laporan keuangan secara komputerisasi -Tersedia software -Siatem informasi yang terintegrasi -Pemeliharaan -Peralatan didata. 	<p>Likert</p>

	tigasnya dengan efektif dan efisien.		
Pemahaman Akuntansi	Pemahaman akuntansi dibuat untuk menuntun sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yang ada di pemerintahan.	-Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah - Paham tentang definisi akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dalam akuntansi.	Likert
Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan	-Relevan -Andal -Dapat Dibandingkan -Dapat Dipahami	-Memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, Tepat waktu dan lengkap. - Tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan kesalahan material, penyajian jujur, serta dapat diverifikasi. -Dapat sibandingkan dengan periode sebelumnya.	Likert

		-Mengandung pengetahuan yang memadai.	
--	--	---------------------------------------	--

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner dimana jawabannya diberi keterangan sebagai berikut:

3.2.4 Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran digunakan adalah *likert*. Skala ini mempunyai jarak dari sangat positif ke sangat negatif terhadap objek sikap tertentu. Skala likert juga diartikan sebagai cara pengukuran dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyataan dan pertanyaan, kemudian diminta untuk memberikan jawaban dengan skor yang diberikan. Skor yang diberikan adalah :

Tabel 3.2

Skala Pengukuran Variabel

No.	Pernyataan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Salah satu yang berhubungan erat dengan sampel adalah populasi. Menurut Mardalis, **“Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.”**¹³Populasi juga sering diartikan sebagai kumpulan objek penelitian darimana data akan dijangar atau dikumpulkan. Populasi dalam penelitian bisa berupa orang (individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakat) maupun benda. Tiap penelitian memerlukan sejumlah orang yang harus kita selidiki. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pengelola keuangan yaitu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKD).

3.3.2 Sampel

Menurut Mardalis, **“ ... sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.”**¹⁴Oleh karena itu, sampel harus sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik penarikan sampel purposive atau yang disebut juga judgmental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidang akuntansi atau dalam menyusun laporan keuangan. Kriteria ahli maksudnya adalah para pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan pegawai yang sudah mempunyai pengalaman bekerja selama 3 tahun di bagian

¹³ Mardalis, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduabelas : PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 53.

¹⁴ **Ibid. hal. 55**

keuangan, baik dalam instansi tersebut maupun pada organisasi lain. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada bagian akuntansi di SKPD, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Fungsi Akuntansi, Staf Bidang akuntansi, Bendahara pada masing-masing biro, dan Pejabat struktural maka total responden dalam penelitian ini adalah 30 orang. Pada SKPD didistribusikan 5 eksemplar kusioner yang disampaikan langsung oleh peneliti kepada sampel yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Responden Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten
Deli Serdang**

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang Akuntansi	1 orang
4	Staf Bidang Akuntansi	4 orang
5	Bendahara penerimaan / pengeluaran	3 orang
6	Seksi Anggaran Pendapatan & Pembiayaan	2 orang

7	Seksi Pencat. Pelaporan APBD	2 orang
8	Seksi Evaluasi & Pelaporan	1 orang
9	Seksi Pendataan & Aset Daerah	2 orang
10	Seksi Belanja Pegawai	2 Orang
11	Seksi Pemeliharaan Peraw. & Optimalisasi Asset	1 orang
12	Seksi Pendaftaran & Pendataan	1 orang
13	Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung	2 orang
14	Seksi Verifikasi	2 orang
15	Seksi Anggaran Belanja Langsung	2 orang
16	Seksi Evaluasi & Pelaporan	1 orang
17	Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah	1 orang
18	Seksi Belanja Non Pegawai	1 orang
	Jumlah	30 Orang

**Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang**

3.4 Metode Penelitian

Metode penelitian terbagi atas dua yaitu :

1. Kepustakaan (*Library research*)

Dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, pemahaman akuntansi, dan laporan keuangan pemerintah.

2. Observasi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi : Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan.
- b. Interview : Metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan berupa jawaban responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada bagian akuntansi di SKPD. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Fungsi Akuntansi, Staf Bidang akuntansi , Bendahara pada masing-masing biro, dan Pejabat Struktural. Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

Menurut Arif Pratistio, pengambilan keputusan untuk pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r_{hitung} negatif atau $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- c. r_{hitung} dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total correlation.¹⁵

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variable dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner.

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai Cronbach alpha dari masing-masing instrument dalam suatu variable. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrument adalah nilai cronbach alpha lebih dari 0.60. Dengan nilai

¹⁵ Arif Pratistio, **Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Perancangan Percobaan dengan SPSS 12**, Penerbit: PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hal. 254.

lebih yang lebih besar dari 0,60, data dianggap baik untuk digunakan dan sudah reliabel.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

1. pengujian Normalitas
2. Pengujian Multikolinieritas
3. Pengujian Heteroskedastisitas

3.5.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Pengujian secara visual dapat dilakukan dengan menggunakan metode gambar *normal probability plots* dalam program SPSS.

Dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi dimana terdapat linier atau kolerasi yang tinggi antara masing-masing variable independen. Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh data yang menjadi data yang nilainya sangat ekstrim.

Menurut Arif Pratisto, regresi yang bebas multikolinearitas ditandai dengan “**nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) berkisar angka 1 dan Nilai *tolerance* berkisar angka 1**”¹⁶. Atau dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variable dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan metode *scatter plot*, dengan memplotkan ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak ditemukan pola tertentu pada grafik, misalnya

¹⁶**Ibid**, Hal. 161

mengumpul ke tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

3.5.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Dengan demikian, peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian ini, karena ada empat variabel independen dan satu variabel dependen.

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pemahaman akuntansi, terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pengolahan data akan dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut:

Kualitas pelaporan keuangan (Y) : $a + b_1 \text{SDM} + b_2 \text{PI} + b_3 \text{PTI} + b_4 \text{PA} + e \dots$

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kualitas Pelaporan Keuangan

X₁ : Sumber Daya Manusia

X₂ : Teknologi Informasi

X₃ : Pengendalian Intern

X₄ : Pemahaman Akuntansi

a : Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ : Koefisien regresi dari **X₁, X₂, X₃, X₄**

e : Kesalahan residual (*error*)

Persamaan diatas kemudian dianalisis dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$)

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi atau besarnya persentase variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai R^2 adalah antara nol sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), hal ini dapat diartikan:

1. Jika $R^2 = 0$, menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika R^2 mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lainnya.
3. Jika R^2 semakin kecil dan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil juga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji- t)

Pengujian statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$) dan juga membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Penerimaan dan penolakan hipotesis dengan tingkat signifikansi dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima.

2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Sedangkan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak.

3.5.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji- F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel- variabel independen terhadap variabel dependen, secara bersama- sama (serentak). Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan Uji- F, atau yang biasa disebut *Analysis of Variance* (ANOVA).

Pengujian ANOVA atau Uji- F dilakukan dengan melihat signifikansi dan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $< 0,5$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan jika pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan demikian pula sebaliknya.